



KLIPING MEDIA MASSA TAHUN 2024 BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

1.	RADAR BANTEN	4.	SATELIT NEWS
2.	BANTEN POS ✓	5.	BANTEN RAYA
3.	KABAR BANTEN	6.	

JANUARI	MEI	SEPTEMBER	2024
FEBRUARI	JUNI	OKTOBER	
MARET	JULI	NOVEMBER	
5 APRIL	AGUSTUS	DESEMBER	

Hasil Pemeriksaan APBD 2023 Rp11,86 T Diserahkan

SERANG, BANPOS - Rencana-nya pada Jumat (hari ini, red) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2023 sebesar Rp11,86 triliun pada rapat paripurna.

Berdasarkan undangan yang menyebar dikalangan DPRD Banten, Kamis (4/4), ada 11 susunan acara dalam rapat paripurna tersebut yang akan digelar pada, ummat tanggal 5 April, dua diantaranya adalah penandatanganan berita acara penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Banten tahun 2023, dan penyerahan LHP oleh anggota V BPK RI kepada pimpinan DPRD dan Pj Gubernur Banten.

Salah seorang sumber di KP3B, Curug Kota Serang yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada BANPOS, banyak temuan yang didapati oleh BPK selama pemeriksaannya beberapa bulan lalu, sebelum hasilnya akan diserahkan ke DPRD Banten dan Pemprov Banten.

"Jadi BPK Perwakilan Provinsi Banten kurang lebih dua bulan ini melakukan pemeriksaan atas kegiatan APBD Banten tahun 2023. Dan temuannya banyak selali, seperti kegiatan proyek-proyek yang kelebihan pembayaran salah satu faktornya adalah tidak sesuai spesifikasi," katanya.

Namun kata dia, sebagian temuan tersebut telah diselesaikan oleh dinas atau OPD dan pengusaha dengan menyetorkan uanh kelebihan itu ke kas daerah. "Ada satu proyek Program Sarana Utilitas (PSU) se-

**Jadi
BPK Perwakilan
Provinsi
Banten
kurang lebih
dua bulan ini
melakukan
pemeriksaan atas
kegiatan APBD
Banten tahun 2023.
Dan temuannya
banyak selali, seperti
kegiatan proyek-
proyek yang
kelebihan
pembayaran salah
satu faktornya
adalah tidak sesuai
spesifikasi**

beaar Rp183 miliar yang katanya belum tuntas kelebihan pembayarannya," ujarnya.

Kelebihan pembayaran tersebut lanjut dia, menyebar di titik lokasi PSU dengan nilai miliaran rupiah. "Kemungkinan angkanya mulai mengecil, karena hari ini (kemarin, red) ada penyetoran kembali oleh pihak ketiga melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim)," katanya.

Kepala Disperkim Banten, Rahmat Rogianto sampai dengan berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan. Pesan tertulis yang dikirim BANPOS belum dijawab.

Wakil Ketua DPRD Banten, Barhum membenarkan adanya rapat paripurna penyerahan LHP BPK atas APBD Banten 2023. "Betul, ada penyerahan LHP," katanya. (RUGAZM)